

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Ayu Nadya Firdausi
Nadyafirda17@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of budget arrangement participation, budget target clarity, and public accountability on local government official performance of Surabaya's SKPD. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling with questionnaires which were distributed to respondents who fulfilled the criteria given. Furthermore, the population was 19 Surabaya's SKPD with a number of 86 respondents as the sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear with SPSS (Statistical Package for Special Science). The research result concluded that budget arrangement participation had a positive effect on local government official performance. Likewise, budget target clarity had a positive effect on local government official performance. Similarly, public accountability had a positive effect on local government official performance. In conclusion, the result was consistent with previous research results in which budget arrangement participation, budget target clarity, and public accountability had a positive and significant effect on local government official performance.

Keywords: budget arrangement participation, budget target clarity, public accountability Surabaya SKPD's performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang dapat memenuhi kriteria untuk diteliti. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut menggunakan populasi sebanyak 19 SKPD di Kota Surabaya dan jumlah responden sebanyak 86. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan menggunakan program *Statisticaal Package for Special Science* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kata Kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kinerja SKPD Kota Surabaya.

PENDAHULUAN

Di era saat ini banyak masyarakat yang mulai sadar bahwasannya hal - hal kecil seperti pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Mereka dapat mengevaluasi dan menilai fasilitas yang berada disekitarnya. Mulai dari apa yang belum disediakan oleh pemerintah sampai yang sudah disiapkan. Sedangkan aparat pemerintah yang ditugaskan agar dapat membangun

fasilitas – fasilitas publik yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan pembangunan fasilitas dan meningkatkan kinerjanya. Di setiap adanya proses perencanaan pembangunan fasilitas harus diimbangi dengan ketersediaan yang meliputi sumber daya manusia, kapasitas kinerja aparat pemerintah daerah dan sumber dana yang baik. Di sisi lain aparat pemerintah juga harus mempertimbangkan anggaran agar dapat mencapai semua program yang diinginkan. Menurut Mulyadi dan Jhoni (2001) anggaran merupakan rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam kesatuan moneter atau ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sesuatu yang sangat penting dari karakteristik tujuan anggaran, sasaran anggaran ini juga berpengaruh besar pada kinerja aparat pemerintah serta dapat membantu aparat pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan dan bisa mempertanggungjawabkan dari suatu keberhasilan atau kegagalan yang telah dilaksanakan. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah mempertanggungjawabkan semua keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tidak adanya kejelasan sasaran anggaran dapat menyebabkan aparat pemerintah menjadi bingung, dan merasa tidak puas serta tidak tenang dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak dapat memotivasi individu dalam mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan (Syafrial, 2009).

Akuntabilitas publik merupakan prinsip untuk mempertanggungjawabkan proses awal sampai dengan akhirnya pelaksanaan program bersifat terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik. Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya akuntabilitas publik masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran pemerintah yang disediakan sehingga aparat pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan sebaik mungkin dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui anggaran tersebut serta berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari rencana atau pelaksanaan program anggaran.

Kinerja merupakan suatu proses pencapaian atas Gambaran dari suatu pelaksanaan program atau kegiatan yang dapat menghasilkan sasaran dan tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu kinerja dapat menghasilkan prestasi yang telah dicapai dalam periode – periode tertentu. Kinerja dapat diukur melalui program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berhasil atau tidaknya dari suatu program atau kegiatan tersebut. Informasi yang digunakan dalam pengawasan kinerja yaitu melakukan pengendalian yang telah disiapkan sebagai rangka bahwa pekerjaan yang dilakukan apakah berjalan dengan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja tidak terdapat pada informasi finansial melainkan dengan informasi non finansial. Menurut Gusmal (2007) kinerja aparat pemerintah daerah adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini apakah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Menurut Medina (2012) menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Berdasarkan teori ini pihak atasan sebagai *principal* yang menciptakan anggaran dan pihak bawahan sebagai *agent* yang menjalankan anggaran. Dalam teori keagenan, partisipasi anggaran merupakan suatu proses kerjasama antara pihak *agent* serta pihak *principal* untuk menentukan penganggaran daerah. Demi tercapainya rencana kerja harus terdapat anggaran didalamnya, dalam proses penyusunan anggaran harus melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap atasan SKPD mempunyai kesempatan untuk memberi usulan mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan dan sebagai acuan untuk menyusun semua rencana kerja agar anggaran sesuai dengan target program yang akan dicapai.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Anthony dan Govindrajan (2005) partisipasi anggaran adalah proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran dan partisipasi dianggap sebagai sarana aktualisasi yang terbaik buat para pekerja dalam rangka meningkatkan diri mereka kepada masing - masing tanggung jawab dan tugas yang diemban. Menurut Handoko, 1998 (dalam Nor, 2007) menyatakan partisipasi sebagai alat pencapaian tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Menurut Anthony dan Govindrajan (2005) anggaran partisipatif mempunyai keunggulan yang pertama tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut berada dibawah pengawasan manajer dan yang kedua penganggaran partisipatif menghasilkan pertukaran informasi yang efektif antara pembuatan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang dekat dengan produk dan pasar.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Anthony dan Govindrajan (2005) menyatakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Menurut Mardiasmo (2009:63) arti penting anggaran pemerintah daerah (PEMDA) dapat dilihat dari aspek yaitu yang pertama anggaran merupakan alat bagi pemda untuk mengarahkan pembangunan sosial - ekonomi, menjamin kesinambungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*), dan *trade offs*, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009:20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hasil dari setiap pemrograman yang telah dicapai oleh aparat pemerintah harus ditunjukkan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut Mardiasmo (2009:21) yaitu, Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*). Pertanggungjawaban *vertikal* (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.

Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*).

Pertanggungjawaban Horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Lingkup akuntabilitas publik. Menurut penelitian Ellwood, 1993 (dalam Mardiasmo, 2009:21) terdapat beberapa dimensi akuntabilitas publik, yaitu Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Akuntabilitas kejujuran (*Accountability For Probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*Legal Accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public: a) akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. b) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. c) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas.

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2009) kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan saran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa indikator kinerja sebagai tolak ukur pelaksanaan menurut Sedarmayanti, 2004 dalam (Ruspina, 2013) yaitu a) indikator masukan (input) adalah menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri kepribadian karyawan dengan hasil (prestasi) kerjanya. Karakteristik kepribadian yang dijadikan objek pengukuran adalah kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi, sopan santun dan lain-lain. b) Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. Maksudnya untuk menilai prestasi kerja karyawan melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah diberikan. a) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik. b) Indikator hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud. c) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. d) Indikator dampak (*impact*) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dan pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Pengembangan Hipotesis

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Pengaruh penyusunan partisipasi anggaran merupakan proses yang melibatkan pegawai atasan (manajer) dan bawahan (pegawai) dalam menyusun anggaran serta dapat mempermudah menentukan tujuan anggaran agar sesuai dengan target yang akan dicapai. Dari anggaran yang telah disusun mempunyai peranan penting yaitu sebagai perencanaan dan kriteria kinerja, anggaran yang dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja aparat pemerintah daerah menurut Lewin, 1970 (dalam Nur, 2011). Dari pengembangan hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa :

H₁ : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran ini merupakan hal yang sangat penting karena jika tidak ada kejelasan anggaran dapat menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi tidak beraturan serta tidak bisa bekerja dengan puas dan tenang. Dalam hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja sehingga tidak dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan sesuai. Agar anggaran dapat berjalan dengan sesuai keinginan maka harus menyusun target-target anggaran. Dengan adanya target-target anggaran juga dapat mempengaruhi dan menghasilkan program yang akan dicapai. Hasil dari penelitian Sari *et. al*, (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Dari pengembangan hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa :

H₂ : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Akuntabilitas Publik

Dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat akan menilai dan mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga berusaha untuk melaksanakan anggaran sebaik mungkin. Selain itu pemerintah juga mendapatkan kepercayaan masyarakat yang akan membuat kinerja lebih mempunyai rasa tanggungjawab dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan anggaran yang telah digunakan untuk suatu program. Menurut penelitian Sari, *et. al*, (2014) akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Dari pengembangan hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa :

H₃ : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini melakukan penyebaran kuisisioner sebanyak 95 kepada responden. Jumlah kuisisioner yang kembali hanya 86 dan kuisisioner yang berjumlah 9 tidak dapat di olah. Dapat dilihat dibawah ini rincian jumlah sampel yang dikembalikan dan dapat di olah sebagai berikut :

Tabel 1
Rincian Penyebaran dan Pengumpulan Data Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang tersebar	95	100%
Kuisisioner tidak kembali	(9)	9,5%
Kuisisioner yang kembali dan dapat diolah	86	90,5%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Karakteristik Usia Responden

Berdasarkan kuisisioner yang telah terkumpul, Tabel dibawah ini menjelaskan usia responden sebagai berikut :

Tabel 2
Gambaran Umum Usia Responden

Usia Responden	Frekuensi	Presentase
20-30 tahun	29	33,7%
31-40 tahun	30	34,8%
41-55 tahun	27	31,3%
Total	86	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui sebagian besar responden berusia 31-40 tahun dengan presentase sebesar 34,8%, sedangkan responden berusia 20-30 tahun dengan presentase sebesar 33,7%, dan responden yang berusia 41-55 tahun dengan presentase sebesar 31,3%.

Karakteristik Jabatan Responden

Berdasarkan kuisioner yang telah terkumpul, Tabel dibawah ini menjelaskan jabatan responden sebagai berikut:

Tabel 3
Gambaran Umum Jabatan Responden

Jabatan Responden	Frekuensi	Presentase
Kepala Sub Bagian	3	3,4%
Staff Keuangan	83	96,5%
Total	86	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa dari sebagian besar responden memiliki jabatan sebagai staff keuangan dengan presentase sebesar 96,5% sedangkan untuk jabatan sebagai kepala sub bagian dengan presentase sebesar 3,4%.

Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan kuisioner yang telah terkumpul, Tabel dibawah ini menjelaskan Pendidikan terakhir responden sebagai berikut :

Tabel 4
Gambaran Umum Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
SMA	13	15,1%
D3	17	19,7%
S1	51	59,3%
S2	5	5,8%
Total	86	100%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa dari sebagian besar responden berpendidikan S1 dengan presentase sebesar 59,3%, untuk pendidikan terakhir D3 dengan presentase sebesar 19,7%, sedangkan pendidikan terakhir SMA dengan presentase sebesar 15,1%, dan pendidikan terakhir S2 dengan presentase sebesar 5,8%.

Hasil Statistik Deskriptif

Dengan adanya deskriptif data dapat mengGambarkan karakter dalam penelitian ini serta dapat memberikan Gambaran sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari Gambaran tersebut data dapat dilihat dari nilai yang lebih kecil (minimum) sampai nilai yang besar (maksimum), serta standar deviasi dan rata - rata dari setiap variabel dalam penelitian ini. Berikut hasil dari pengolahan data statistik deskriptif pada Tabel 5 :

Tabel 5
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PA	86	13	35	27,29	4,604
KJA	86	17	30	25,65	3,075
AKP	86	27	45	38,34	4,348
KAPD	86	24	49	39,77	5,000
Valid N	86				

Sumber : Data primer diolah, 2020

**Uji Kualitas Data
Uji Validitas**

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Partisipasi Anggaran

Item Pernyataan	r hitung	r Tabel ($\alpha=0,05$)	Keterangan
PA_1	0,810	0,2120	Valid
PA_2	0,786	0,2120	Valid
PA_3	0,764	0,2120	Valid
PA_4	0,758	0,2120	Valid
PA_5	0,876	0,2120	Valid
PA_6	0,828	0,2120	Valid
PA_7	0,844	0,2120	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian validitas diatas, untuk variabel partisipasi anggaran menyatakan bahwa di setiap pertanyaan mempunyai hasil yang valid, dikarenakan nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rTabel. Untuk mengetahui rTabel dan rhitung dapat diketahui dengan rumus $N-2 \alpha=0,05$ maka $86-2=84$, jadi untuk nilai rTabel sebesar 0,2120. Dari pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran menyatakan valid.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

Item Pernyataan	r hitung	r Tabel ($\alpha=0,05$)	Keterangan
KJA_1	0,834	0,2120	Valid
KJA_2	0,846	0,2120	Valid
KJA_3	0,834	0,2120	Valid
KJA_4	0,798	0,2120	Valid
KJA_5	0,852	0,2120	Valid
KJA_6	0,786	0,2120	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian validitas diatas, untuk variabel kejelasan sasaran anggaran menyatakan bahwa di setiap pernyataan mempunyai hasil yang valid, dikarenakan nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rTabel. Untuk mengetahui rTabel dan rhitung dapat diketahui dengan rumus $N-2 \alpha=0,05$ maka $86-2=84$, jadi untuk nilai rTabel sebesar 0,2120. Dari pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa untuk mengukur variabel kejelasan sasaran anggaran menyatakan valid.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik

Item Pernyataan	r hitung	r Tabel ($\alpha=0,05$)	Keterangan
AKP_1	0,715	0,2120	Valid
AKP_2	0,805	0,2120	Valid
AKP_3	0,835	0,2120	Valid
AKP_4	0,827	0,2120	Valid
AKP_5	0,721	0,2120	Valid
AKP_6	0,776	0,2120	Valid
AKP_7	0,741	0,2120	Valid
AKP_8	0,744	0,2120	Valid
AKP_9	0,715	0,2120	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian validitas diatas, untuk variabel akuntabilitas publik menyatakan bahwa di setiap pernyataan mempunyai hasil yang valid, dikarenakan nilai

rhitung lebih besar dari pada nilai rTabel. Untuk mengetahui rTabel dan rhitung dapat diketahui dengan rumus $N-2 \alpha=0,05$ maka $86-2=84$, jadi untuk nilai rTabel sebesar 0,2120. Dari pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa untuk mengukur variabel akuntabilitas publik menyatakan valid.

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Item Pernyataan	r hitung	r Tabel ($\alpha=0,05$)	Keterangan
KAPD_1	0,623	0,2120	Valid
KAPD_2	0,621	0,2120	Valid
KAPD_3	0,619	0,2120	Valid
KAPD_4	0,660	0,2120	Valid
KAPD_5	0,660	0,2120	Valid
KAPD_6	0,782	0,2120	Valid
KAPD_7	0,701	0,2120	Valid
KAPD_8	0,744	0,2120	Valid
KAPD_9	0,732	0,2120	Valid
KAPD_10	0,728	0,2120	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian validitas diatas, untuk variabel kinerja aparat pemerintah daerah menyatakan bahwa di setiap pernyataan mempunyai hasil yang valid, dikarenakan nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rTabel. Untuk mengetahui rTabel dan rhitung dapat diketahui dengan rumus $N-2 \alpha=0,05$ maka $86-2=84$, jadi untuk nilai rTabel sebesar 0,2120. Dari pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa untuk mengukur variabel kinerja aparat pemerintah daerah menyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas berfungsi untuk mengetahui dan mengukur apakah suatu pernyataan dapat dikatakan handal atau reliabel. Dalam pengukuran reliabilitas ini menggunakan hasil dari uji koefisien *cronbach alpha*. Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji reliabilitas dari masing - masing variabel.

Tabel 10
Hasil Uji Reliabilitas

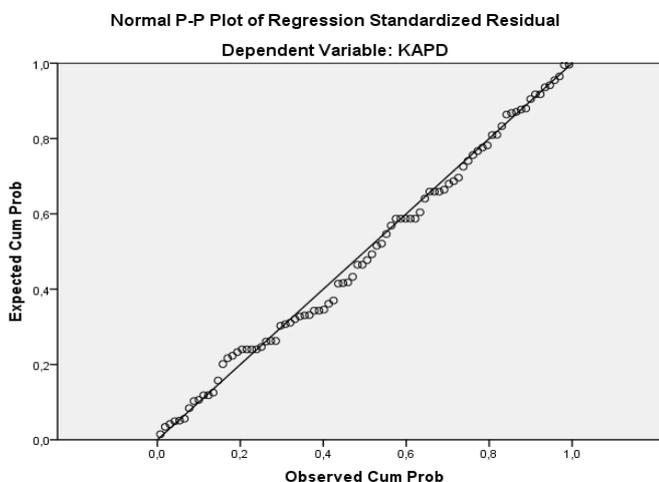
Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Koefisien <i>Alpha</i>	Keterangan
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,909	0,70	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,906	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Publik	0,911	0,70	Reliabel
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	0,870	0,70	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian reliabilitas diatas, nilai dari *cronbach alpha* dari masing - masing variabel seperti penyusunan anggaran memperoleh 0,909, kejelasan sasaran anggaran memperoleh nilai 0,906, akuntabilitas publik memperoleh nilai 0,911, dan untuk kinerja aparat pemerintah daerah memperoleh nilai 0,870. Dari nilai *cronbach alpha* di atas sudah menunjukkan bahwa pernyataan dari kuisisioner tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Pengujian normalitas berfungsi sebagai alat ukur untuk menguji sebuah regresi dapat dikatakan normal atau tidak berdasarkan data distribusi. Data distribusi dapat dikatakan normal jika dilihat dari bentuk grafik dengan cara penyebaran data disekitar garis - garis diagonal. Berikut hasil dari pengujian normalitas.



Gambar 1
Uji Normalitas
Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian normalitas diatas, dapat disimpulkan bahwa titik - titik dapat menyebar sesuai disekitar garis - garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua persyaratan yang terdapat dalam persyaratan uji normalitas data terpenuhi.

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,18120056
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,593
Asymp. Sig. (2-tailed)		,873

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji statistik yang menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Z* mendapat nilai *Asymp. Sig.* bernilai sebesar 0,873 dan hasil nilai ini lebih besar dari 0,05, hasil tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal karena telah melampaui nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan model regresi dapat digunakan dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas berfungsi sebagai alat ukur untuk menguji sebuah model regresi apakah ditemukan adanya korelasi pada variabel independen (variabel bebas). Uji

multikolonieritas dapat terjadi apabila variabel independen berhubungan secara signifikan. Dilihat dari hasil pengujian yang memperoleh nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF yang menunjukkan < 10 yang juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas pada model regresi tersebut. Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji multikolonieritas.

Tabel 12
Hasil Uji Multikolonieritas

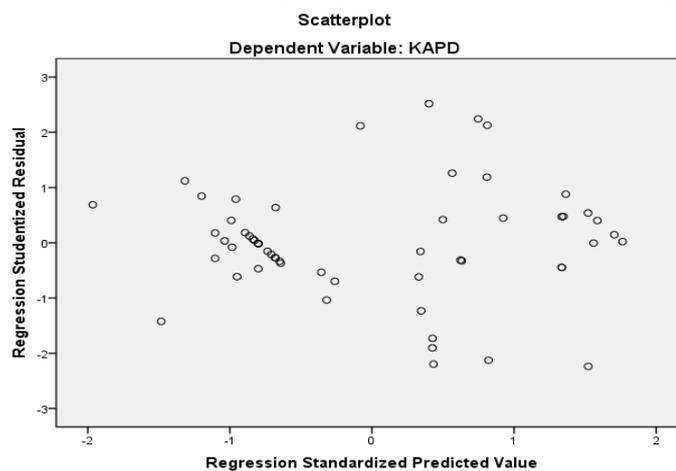
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Partisipasi Penyusunan Anggaran (PA)	0,637	1,569
Kejelasan Sasaran Anggaran (KJA)	0,239	1,319
Akuntabilitas Publik (AKP)	0,164	1,173

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas, pada Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran memperoleh nilai sebesar 0,637, kejelasan sasaran anggaran memperoleh sebesar 0,239 dan akuntabilitas publik memperoleh sebesar 0,164 untuk nilai tersebut tidak kurang dari nilai $>0,10$. Untuk nilai VIF partisipasi anggaran memperoleh nilai sebesar 1,569, kejelasan sasaran anggaran memperoleh sebesar 1,319 dan untuk akuntabilitas publik memperoleh sebesar 1,173. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya suatu multikolonieritas antar variabel pada model regresi tersebut.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas berfungsi sebagai alat ukur untuk menguji adanya ketidaksamaan varians pada residual yang satu ke pengamatan yang lain. Uji ini menggunakan cara dengan melihat grafik *scatterplot*. Jika dalam grafik *scatterplot* nilai berada dibawah angka 0 pada sumbu Y dan juga tidak menunjukkan pola yang teratur maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut hasil dari pengujian heterokedastisitas pada Gambar 2.



Gambar 2
Scatterplot

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian heterokedastisitas, dapat disimpulkan bahwa pada Gambar diatas menunjukkan titik - titik dapat menyebar secara acak dengan menyebar ke atas dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat dikatakan bahwa regresi yang telah terbentuk dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi berfungsi sebagai alat ukur untuk melihat adanya korelasi antar variabel. Uji autokorelasi dapat diketahui dengan Tabel Durbin Watson. Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji autokorelasi.

Tabel 13
Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,772 ^a	,595	,580	3,239	1,739

a. Predictors : (Constant), PA, KJA, AKP

b. Dependent Variable : KAPD

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa nilai pada Durbin-Watson 1,739 dan nilai tersebut dibandingkan dengan nilai signifikan $\alpha=5\%$, dalam penelitian ini sampel berjumlah $n=86$ dan jumlah variabel independent berjumlah $3 k=3$, dari Tabel Durbin-Watson dapat diketahui nilai $du = 1,7221$ lebih dan nilai $dL = 1,5780$ lebih besar dari pada nilai Durbin- Watson. Dari kesimpulan diatas menjelaskan bahwa data bebas autokorelasi apabila $dL < Dw < 4 - dU$. Perhitungannya adalah $1,5780 < 1,739 < 4 - 1,7221 = 2,2779$.

Analisis Linier Berganda

Analisis linier berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Surabaya. Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji analisis linier berganda.

Tabel 14
Hasil Uji Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,182	3,372		3,426	,019
Partisipasi Anggaran	,614	,096	,565	6,424	,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	,284	,232	,237	4,118	,011
Akuntabilitas Publik	,329	,284	,314	3,720	,017

a. Dependent Variable : KAPD

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dipersamakan dengan model regresi sebagai berikut:

$$KAPD = 8,182 + 0,614 PA + 0,284 KJA + 0,329 AKP$$

Dari persamaan analisis linier berganda diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Konstanta $\alpha = 8,182$

Dari persamaan analisis linier berganda diatas diketahui mempunyai nilai konstanta positif sebesar 8,182. Dapat dijelaskan jika variabel Partisipasi Anggaran (PA), Kejelasan Sasaran Anggaran (KJA), Akuntabilitas Publik (AKP) tidak ada maka variabel Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (KAPD) memperoleh nilai 8,182.

$$B1 = 0,614$$

Dari variabel partisipasi anggaran diatas menyatakan bahwa arah hubungan menunjukkan arah yang positif dan searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Jika kinerja aparat pemerintah daerah meningkat maka nilai akan naik sebesar 0,614 atau sebesar 61,4%.

$$B2 = 0,284$$

Dari variabel kejelasan sasaran anggaran diatas menyatakan bahwa arah hubungan menunjukkan arah yang positif dan searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Jika kinerja aparat pemerintah daerah meningkat maka nilai akan naik sebesar 0,284 atau sebesar 28,4%.

$$B3 = 0,329$$

Dari variabel akuntabilitas publik diatas menyatakan bahwa arah hubungan menunjukkan arah yang positif dan searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Jika kinerja aparat pemerintah daerah meningkat maka nilai akan naik sebesar 0,329 atau sebesar 32,9%.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji koefisien determinasi.

Tabel 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,772 ^a	,595	,580	3,239

a. Predictors : (Constant), PA, KJA, AKP

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian R^2 , dapat disimpulkan bahwa nilai dari koefisien determinasi (R^2) memperoleh nilai sebesar 0,595. Dalam hal ini nilai 59,5% yang mempunyai pengaruh pada variabel independen (partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik) terhadap variabel dependen (kinerja aparat pemerintah daerah). Sisa dari nilai 59,5% adalah 40,5% yang dipengaruhi dari faktor lain dan tidak dapat diketahui oleh penelitian ini.

Uji F

Uji F berfungsi untuk menguji kelayakan model apakah terdapat ada atau tidak nya dari pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) yang dapat diketahui dengan uji F. Hasil dari uji ini diketahui apabila nilai signifikansi $< 0,5$ atau $F_{hitung} > F_{Tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan pada variabel bebas. Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji F.

Tabel 16
Hasil Uji F

Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1256,146	3	421,715	40,201	,000 ^a
	Residual	860,203	82	10,490		
	Total	2125,349	85			

a. Dependent Variable : KAPD

b. Predictors (Constant) : AKP, PA, KJA

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari pengujian uji F dapat diketahui nilai F_{hitung} memperoleh nilai sebesar 40,201 > F_{tabel} memperoleh sebesar 2,72 dan angka sig. sebesar ,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel mendapatkan kecocokan nilai.

Uji T

Uji T berfungsi untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen kepada variabel dependen dan bersifat parsial. Dalam hal ini dapat mengidentifikasi apakah variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut Tabel dibawah ini menyatakan hasil dari uji T.

Tabel 17
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	8,182	3,372		3,426	,019
Partisipasi Anggaran	,614	,096	,565	6,424	,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	,284	,232	,237	4,118	,011
Akuntabilitas Publik	,329	,284	,314	3,720	,017

a. Dependent Variable : KAPD

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil dari uji T dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Pertama

H_1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran dapat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi memperoleh sebesar 0,00 yang lebih kecil dari nilai 0,05, dari nilai tersebut menandakan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Pernyataan diatas disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran sangat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya anggaran semua program akan mencapai hasil atau sasaran yang diinginkan.

Pengujian Hipotesis Kedua

H_2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini menguji apakah kejelasan sasaran anggaran dapat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi memperoleh sebesar 0,01 yang lebih kecil dari nilai 0,05, dari nilai tersebut menandakan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Pernyataan diatas disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah, karena adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah aparat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan semua keberhasilan atau kegagalan dari suatu pelaksanaan program yang diciptakan.

Pengujian Hipotesis Ketiga

H_3 : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini menguji apakah kejelasan akuntabilitas publik dapat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi memperoleh sebesar 0,01 yang lebih kecil dari nilai 0,05, dari nilai tersebut

menandakan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima. Pernyataan diatas disimpulkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah, karena adanya akuntabilitas publik dapat meyakinkan masyarakat bahwa kinerja aparat pemerintah mempertanggungjawabkan semua dari awal pelaksanaan hingga selesai nya pelaksanaan bersifat umum (terbuka). Selain itu dapat mempermudah kinerja aparat pemerintah untuk mengelola dana publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: a) Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD Kota Surabaya yang memiliki nilai positif signifikan memperoleh nilai sebesar 0,00 dan lebih kecil dari pada nilai 0,05. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai peran penting dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa H_1 dapat diterima. b) Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD Kota Surabaya yang memiliki nilai positif signifikan memperoleh nilai sebesar 0,01 dan lebih kecil dari pada nilai 0,05. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai peran penting dalam mempermudah aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang dicapai. Selain itu, apa yang dilakukan aparat pemerintah dapat dipertanggung jawabkan atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program nya. . Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa H_2 dapat diterima. c) Akuntabilitas publik mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD Kota Surabaya yang memiliki nilai positif signifikan memperoleh nilai sebesar 0,01 dan lebih kecil dari pada nilai 0,05. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai peran penting dalam meyakinkan masyarakat bahwa kinerja aparat pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua dari awal pelaksanaan hingga selesai nya pelaksanaan bersifat umum (terbuka).

Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang bisa bermanfaat dalam penelitian ini: (a) Untuk penelitian berikutnya, diharapkan untuk menggunakan objek (tempat) penelitian yang lebih luas lagi di seluruh OPD pada Kota Surabaya, (b) Untuk penelitian berikutnya, diharapkan bisa menambahkan variabel - variabel lain diluar model penelitian ini, seperti struktur desentralisasi, pengendalian intern, dan komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N dan V. Govindarajan, 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen Buku 2. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Gusmal. 2007. *Lakip Pemerintah Kabupaten Solok*. Solok.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat*. Andi. Yogyakarta.
- Medina, F. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mulyadi dan Jhoni. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Aditya Media. Yogyakarta.

- Nor, Wahyudin. 2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. SNA X. Makassar.
- Nur, E.W. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Programs*. Universitas Diponegoro.
- Ruspina, Depi Oktia. 2013. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintahan Kota Padang). *Skripsi*. UNP. Padang
- Sari, Desak Putu Intan Permata., Sinarwati dan Sujana. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD (studi empiris SKPD Kabupaten Buleleng). *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2(1)*.
- Syafrial. 2009. Pengaruh Ketetapan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.